



## **BUPATI KARANGANYAR**

### **INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR**

**NOMOR 180 / 20 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PRIORITAS PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI  
SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

Dalam rangka percepatan penyesuaian produk hukum daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, maka perlu menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati prioritas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diinstruksikan kepada:

1. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

Untuk:

**KESATU** : Segera melaksanakan kegiatan prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana tersebut pada Lampiran Instruksi Bupati ini.

**KEDUA** : Dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Kepala Perangkat Daerah diminta agar segera:

- a. menyusun Analisa Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP) sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda dalam penyesuaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);

- b. menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja SKPD sesuai target penyelesaian sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran Instruksi Bupati ini;
- c. mengalokasikan sumber daya (dana/SDM/waktu) untuk memenuhi target prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU; dan
- d. menyusun Naskah Akademik serta rancangan peraturan daerah/bupati dimaksud.

**KETIGA** : Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Juli 2021  
BUPATI KARANGANYAR,  
TTD

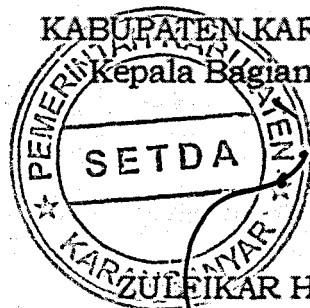
JULIYATMONO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah, melalui  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar; dan
3. Inspektur Daerah.



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



KARZULEIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN INSTRUKSI BUPATI  
 NOMOR 180 / 20 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PRIORITAS PENYUSUNAN PERATURAN  
 DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SEBAGAI  
 TINDAK LANJUT ATAS DIUNDANGKANNYA  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN  
 PELAKSANAANNYA

PRIORITAS PENYUSUNAN PERDA DAN PERBUP SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS DIUNDANGKANNYA  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

NO	PERANGKAT DAERAH	DAFTAR		TINDAK LANJUT	TARGET
		PERDA	PERBUP		
1	2	3	4	5	6
1.	Disdagnakerkop dan UKM	Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro		✓ Diubah  <u>Catatan:</u> Memasukkan substansi Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima	2022
		Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengembangan dan pembinaan Pasar Rakyat		✓ Dibuatkan Perbup Juknisnya  <u>Catatan:</u> Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	2021

2.	Dinas Lingkungan Hidup		Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif	✓ Diubah  <u>Catatan:</u> Disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2021
		Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah		✓ Diubah  <u>Catatan:</u> Memasukkan substansi dari Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2022
3.	DPMPTSP		Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perbup Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan	✓ Membuat Perbup Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  <u>Catatan:</u> Memasukkan substansi 2 (dua) Perbup yaitu Perbup Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perbup Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan	2021
4.	DPU-PR	Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan		✓ Mencabut Perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 21 Tahun	2022

		Atas Perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan		2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan <input checked="" type="checkbox"/> Menyusun Perda Penyelenggaraan Bangunan  <u>Catatan:</u> Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	2022
		Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi		<input checked="" type="checkbox"/> Menyusun Perda Retribusi Perizinan Tertentu <input checked="" type="checkbox"/> Mencabut Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi  <u>Catatan:</u> Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	2022  2021
				<input checked="" type="checkbox"/> Menyusun Perbup Rencana Detail Tata Ruang  <u>Catatan:</u> sudah dibuat untuk 7 (tujuh) Kecamatan, dan ada 10 (sepuluh) Kecamatan yang belum dibuat	2021-2022
			Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi	<input checked="" type="checkbox"/> Menyusun Perbup Pengadaan Tanah Skala Kecil	2021

			Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	✓ Mencabut Perbup Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2021
5.	Dispertan PP	Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan pertanian Daerah		✓ Menyusun Perbup Juklak untuk Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pertanian Daerah	2021

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

